

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD  
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
BULAN JULI DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR**

**A. Waktu Penyelenggaraan Rakor**

Jumat, 9 Agustus 2024

**B. Pimpinan Rakor**

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

**C. Peserta Rakor**

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kepala UPTD
4. Kepala Sub Bagian
5. Sub Koordinator
6. Bendahara Pembantu
7. Bendahara Pelaksana Pembantu
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

**D. Notulis**

Sub Bagian Program

**II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI**

**A. Realisasi sampai dengan bulan ini**

- a. Fisik = 60,31 %
- b. Keuangan = 12.606.612.080 (56,35%)

**B. Kegiatan yang berdeviasi fisik**

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>							
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>							
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	207.733.000			118.207.645		
1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	103.000	46,42	37,61	28.344	(8,81)	Menyesuaikan kebutuhan
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.630.000	62,78	57,60	3.969.301	(5,18)	Menyesuaikan kebutuhan
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	200.000.000	60,55	58,84	114.210.000	(1,71)	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	290.520.000			163.820.000		

1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	290.520.000	58,24	58,06	163.820.000	(0,18)	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.800.000			26.591.600		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.800.000	48,45	29,29	26.591.600	(19,16)	Menyesuaikan Kebutuhan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	223.000.000			0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	223.000.000	44,84	30	0	(14,84)	Pengecatan masih dalam proses pengerjaan.
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>							
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>							
<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	44.320.000			5.235.000		
1	Konsultasi PUG	44.320.000	53,57	48,40	5.235.000	(5,17)	sppd luar daerah menyesuaikan kebutuhan
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>							
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>							
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	249.731.000			94.642.000		
1	Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	249.731.000	40,32	39,52	94.642.000	(0,80)	Perjadiin menyesuaikan jadwal BKOW
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak</b>							
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>							
<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>							
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	85.344.000			39.097.960		

1	Pelaksanaan Layanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga)	85.344.000	58,31	45,80	39.097.960	(12,51)	terdapat 1 orang non ASN yg resign
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>							
<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>							
	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	57.100.000			36.046.500		
1	Pelaksanaan Evaluasi dan Verifikasi KLA Tingkat Provinsi	57.100.000	100	63,14	36.046.500	(36,86)	Bimtek tim verifikasi administrasi KLA sudah dilaksanakan bulan Juli. perjadi verifikasi KLA dialihkan untuk pendampingan
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>							
<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>							
	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	51.000.000			16.800.000		
1	Pelaksanaan FGD Pembahasan Kebijakan Perlindungan Anak	51.000.000	40,80	36,88	16.800.000	(3,92)	penyesuaian kebutuhan jumlah narasumber, moderator, dan tim penyusun dari 5x fgd sudah dilaksanakan 4x (april s/d juli). 1x akan dilaksanakan di bulan agustus. bln september untuk pembayaran honor tim untuk rapergub RAD perlindungan anak
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera</b>							
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>							
<b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>							
	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	58.844.000			39.809.020		

1	Sosialisasi Penurunan Angka Stunting Melalui Kelompok BKB	58.844.000	69,74	67,64	39.809.020	(2,10)	ada pengembalian UH Peserta di bulan Februari
<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>							
	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	44.347.000			9.445.000		
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk dan Jaringan Usaha Kelompok UPPKA	44.347.000	72,50	18,78	9.445.000	(53,72)	Bimtek UPPKA belum dilaksanakan di bulan Juli karena Greenhouse belum sepenuhnya siap (masih dalam proses pembangunan). progres saat ini sudah 50%, sisa pembangunan greenhouse akan diselesaikan di bulan agustus.
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak</b>							
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>							
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	445.800.000			207.452.850		
1	Belanja Modal Gedung Puspowarno	445.800.000	100	82,68	207.452.850	(17,32)	Realisasi fisik sampai Juli harusnya 81,165 % Pekerjaan rehab belum selesai karena rekanan tidak bisa mengerjakan sesuai target
Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :		14	0	0			
Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :		0	0	0			

### III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

#### Permasalahan

1. Pekerjaan rehab belum selesai karena rekanan tidak bisa mengerjakan sesuai target (UPTD);
2. Bimtek UPPKA belum dilaksanakan di bulan Juli dan Greenhouse belum sepenuhnya siap untuk dilakukan untuk pemasangan (KS);
3. Klasifikasi kampung KB yang mandiri dan berkelanjutan masih rendah (Dalduk);
4. Belum ada identifikasi DRPPA (PP);
5. Kegiatan sosialisasi menyesuaikan jadwal dewan (KB);
6. Kurang aktifnya PSW/PSG sehingga penyerapan belanja kurang optimal (KG);
7. Implementasi ARG di lingkungan provinsi Jawa Tengah belum bisa optimal (KG)

#### Upaya

1. Koordinasi untuk penyelesaian pekerjaan antara dinas dan rekanan (UPTD);
2. Bimtek UPPKA akan dilaksanakan pada bulan Agustus (KS);
3. Mendorong kab/kota untuk melaporkan kegiatan kampung KB di website kampung KB (Dalduk);
4. Dilakukan pendataan identifikasi DRPPA (PP);

#### IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak (UPTD);
2. Lanjutan penyelesaian rehab gedung (UPTD);
3. Advokasi pengembangan KIE Perlindungan khusus anak di Desa dampingan bekerja sama dengan UNNES fakultas ilmu pendidikan dan psikologi dengan peserta 25 ayah yang punya anak usia paud (PA);
4. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK kewenangan provinsi di Kota Semarang untuk menindaklanjuti rencana aksi penyediaan psikososial bagi anak penyandang disabilitas di kawasan kebencanaan bersama kemenPPA (PA);
5. FGD pembahasan kebijakan perlindungan anak terkait finalisasi rapergub RAD perlindungan anak (PA);
6. Bimtek UPPKA (KS);
7. Rakor BPD AKU (KS);
8. Sosialisasi kegiatan tribina dan UPPKA dalam upaya penurunan angka stunting di Jawa Tengah (KS);
9. Sosialisasi pendidikan kependudukan di 1 titik (Dalduk);
10. Workshop advokasi pendidikan kependudukan (Dalduk);
11. FGD Strategi Meningkatkan Kualitas Kampung KB Mandiri dan Berkelanjutan (Dalduk);
12. Rapat Rutin forum anak (PHA);
13. Ngopi penak (PHA);
14. Rapat persiapan KFA (PHA);
15. Pendataan DRPPA (PP);
16. FGD dewan (PP);
17. Peningkatan Kapasitas Pendampingan bagi Perempuan Korban kekerasan (PP);
18. Rapat rutin BKOW dan DWP (PP);
19. FGD Dewan (KIE);
20. Sosialisasi peningkatan kapasitas PPKBD di 4 titik (KB);
21. Safari pelayanan KB di 5 titik (KB);
22. FGD Dewan (KG);
23. PPEP: pelatihan perijinan bagi UMK digeser jadwalnya dengan monev PPEP (KG);
24. Dikpol (KG);

#### V. PENUTUP

##### Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya
2. Apabila target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Juli 2024, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Jumat, 9 Agustus 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA



Dra. RETNO SUDEWATI, Apt. MSi. MM

NIP. 196811241993102001